



In partnership with  
**Canada**



# Membangun Masa Depan yang Setara: Pendekatan Responsif Gender pada Proses Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan di Daerah

Penulis: Tania Benita, Rathasari, Seruni Fauzia Lestari, Ni Putu Trisnaning Laksemi, Ira Ratna Sari, Feri Johana

Untuk mencapai masa depan yang setara, **perempuan dan laki-laki perlu terlibat, didengarkan aspirasinya, dan memiliki akses yang berkeadilan terhadap manfaat pembangunan.** Kebijakan yang mengatur perencanaan, monitoring, dan evaluasi di Indonesia saat ini telah berusaha memastikan pendekatan yang responsif gender. Bagaimana pendekatan ini diimplementasikan?

Pembelajaran dari proses pendampingan di Sumatera Selatan, Sulawesi, dan NTT telah memberikan beberapa poin kunci yang diuraikan dalam poster ini:

- Latar belakang
- Metode dan pendekatan
- Bentuk ideal dan gap pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan
- Ilustrasi identifikasi isu berbasis gender
- Simpulan dan rekomendasi

## 1 Pengarusutamaan Gender

- Menurut Council of Europe (1998), pengarusutamaan gender adalah **proses (re) organisasi, perbaikan, pengembangan, dan evaluasi kebijakan yang mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender di semua tingkatan dan tahapan.**
- Proses ini dilakukan oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan kebijakan.

- Menyusun **perencanaan, pemantauan, dan evaluasi berbasis gender di Indonesia sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dalam pembanguana, serta menangani perubahan iklim secara efektif.**
- Upaya ini sejalan dengan definisi pengarusutamaan gender, regulasi yang ada, dan pengukuran integrasi gender di Indonesia.

## 2 Keterkaitan Gender dan Perubahan Iklim

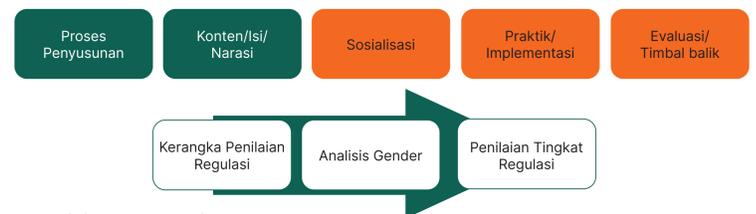
Pengarusutamaan gender menjadi strategi penting dalam penanganan perubahan iklim. UNFCCC Conference of the Parties 27 di Egypt tahun 2022 menegaskan hubungan antara kesetaraan gender dan perubahan iklim. **Diperlukan aksi perubahan iklim yang konkret dengan melibatkan perempuan dan anak perempuan dalam pengambilan keputusan.** COP27 menghasilkan kesepakatan untuk memperbaharui dan memperkuat *Gender Action Plan* (GAP).

## 3 Bentuk ideal dan gap pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan

Dokumen perencanaan daerah	Bentuk ideal pengarusutamaan gender dalam berbagai kebijakan di daerah	Sumatera Selatan	Sulawesi Selatan	NTT
RPJPD RPJMD RKPD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan data terpilah gender dalam analisis kondisi daerah</li> <li>• Penggunaan analisis gender dan inklusi sosial dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan, dan strategi pembangunan daerah</li> <li>• Analisis GAP dan GBS untuk program prioritas pembangunan</li> <li>• Penandaan anggaran untuk program pembangunan yang responsif gender</li> <li>• Analisis gender dan inklusi sosial dalam penetapan isu strategis daerah</li> <li>• Penetapan indikator responsif gender dalam IKU dan IKK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data terpilah gender belum tersedia secara lengkap</li> <li>• Analisis GAP dan GBS sudah dilakukan</li> <li>• Indikator sudah masuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada aplikasi data terpilah gender, namun data terpilah gender belum tersedia secara lengkap</li> <li>• Analisis GAP dan GBS sudah dilakukan</li> <li>• Pelibatan berbagai kelompok dalam diskusi (WRO, CSO)</li> <li>• Indikator sudah masuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data terpilah gender belum tersedia secara lengkap</li> <li>• Analisis GAP dan GBS sudah dilakukan</li> <li>• Pelibatan berbagai kelompok dalam diskusi (WRO, CSO)</li> <li>• Indikator sudah masuk</li> </ul>
RTRW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan data terpilah gender untuk analisis isu struktur ruang dan pola ruang</li> <li>• Pemetaan Kebijakan, Rencana, Program (KRP) berdampak berbasis analisis gender dan inklusi sosial</li> <li>• Representasi kelompok rentan dalam forum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data terpilah gender belum tersedia secara lengkap</li> <li>• Pemetaan program ruang yang berbasis gender sudah coba diinisiasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada aplikasi data terpilah gender, namun data terpilah gender belum tersedia secara lengkap</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data terpilah gender belum tersedia secara lengkap</li> <li>• Representasi berbagai kelompok dalam diskusi sudah diupayakan</li> </ul>
Renstra PD Renja PD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan data terpilah gender sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah</li> <li>• Analisis gender dan inklusi dalam penetapan isu strategis</li> <li>• Analisis GAP dan GBS untuk program perangkat daerah</li> <li>• Penandaan anggaran untuk program pembangunan yang responsif gender</li> <li>• Penetapan indikator responsi gender</li> </ul>	Belum ada	Belum ada	Belum ada
Rencana Aksi Daerah (e.g., RAD API, RAD PG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan data terpilah gender</li> <li>• Analisis kerentanan perempuan, laki-laki, maupun disabilitas terhadap isu yang diangkat misalnya (1) kerentanan perempuan dan laki-laki terhadap dampak perubahan iklim untuk RAD API; (2) kerentanan perempuan, laki-laki dan disabilitas terhadap ketahanan pangan dan gizi</li> <li>• Penyusunan program berbasis gender dan inklusi sosial</li> <li>• Penetapan indikator kinerja berbasis gender dan inklusi sosial</li> </ul>	Belum ada	Belum ada	Belum ada

## 4 Metode dan Pendekatan

Integrasi Gender dalam Kebijakan, dilihat melalui setiap tahapan yaitu:



Contoh kategori tingkat regulasi:

Buta Gender	Netral Gender	Sensitif/Responsif Gender	Transformatif Gender
Tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan	Tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan	Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan	Mempertimbangkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan
Mengabaikan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok sosial	Mengabaikan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok sosial	Mempertimbangkan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok sosial	Mempertimbangkan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai kelompok sosial
Cenderung mendiskriminasi perempuan dan kelompok rentan lainnya	Berpotensi mendiskriminasi perempuan dan kelompok rentan lainnya	Berupaya mengurangi kesenjangan gender	Menyasar akar persoalan terjadinya ketidakadilan gender

## 5 Tahapan Penting dalam Integrasi Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

- Pemetaan pemangku kepentingan**: Perlu identifikasi kelompok rentan/marginal (Perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, komunitas lokal, Masyarakat adat)
- Kajian isu strategis Pembangunan menggunakan perspektif GEDSI**: Dalam mengkaji kesenjangan gender dapat menggunakan pendekatan akses, control, partisipasi, manfaat
- Integrasi dalam visi, misi, dan sasaran pembangunan**: Perlu identifikasi kelompok rentan/marginal (Perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, komunitas lokal, Masyarakat adat)
- Analisis gender dan inklusi social dalam perumusan arah kebijakan, program, kegiatan**: Perlu identifikasi kelompok rentan/marginal (Perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, komunitas lokal, Masyarakat adat)
- Budget tagging untuk kegiatan/program responsive gender**: Penandaan anggaran penting untuk mengevaluasi implementasi perencanaan yang responsive gender.

## 6 Ilustrasi Telaah Kebijakan dan Identifikasi Isu Awal Indikator SDGs Gender dan Isu Kesenjangan Perubahan Iklim

Sumber: Hasil FGD Bersama DP3A Sulawesi Selatan, 2022

<b>1. Penurunan produktivitas (gagal panen)</b> 1.1 Perbedaan akses perempuan dan laki-laki terhadap saptawati pertanian, permodatan, dan informasi 1.2 Partisipasi perempuan dalam penyuluhan dan kelompok tani (terutama perikanan) masih terbatas 1.3 Kurang pengawasan terhadap penggunaan zat kimia, tata kelola air dan pengendalian hama belum optimal (dominasi laki-laki)	<b>2. Meningkatnya intensitas bencana</b> 2.1 Laki-laki lebih banyak terlibat dalam perencanaan infrastruktur lingkungan 2.2 Partisipasi perempuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga lebih tinggi 2.3 Kurangnya penyediaan sarana penampungan sementara yang layak/ sesuai kebutuhan	<b>3. Putus sekolah &amp; perkawinan anak</b> 3.1 Pendidikan layak sulit diakses anak-anak di perdesaan 3.2 Keputusan untuk tidak menyekolahkan anak karena keamanan, terutama perempuan 3.3 Pendidikan untuk anggota keluarga laki-laki lebih diprioritaskan karena menjadi tulang punggung	<b>4. Rendahnya kualitas layanan kesehatan</b> 4.1 Jalan yang rusak sehingga sulit menjangkau layanan kesehatan, terutama difabel dan lansia 4.2 Lansia dan difabel tidak memiliki saluran layanan darurat kesehatan 4.3 Keputusan keluarga dalam memilih layanan proses kelahiran menjadi prioritas	<b>5. Degradasi DAS, jasing, &amp; kehati</b> 5.1 Laki-laki memiliki akses pengelolaan lahan lebih tinggi dibandingkan perempuan 5.2 Partisipasi masih rendah dalam pengelolaan lahan berkelanjutan 5.3 Partisipasi masih rendah dalam pengelolaan lahan berkelanjutan	<b>6. Ketersediaan air bersih</b> 6.1 Partisipasi masih rendah dalam pengelolaan lahan berkelanjutan 6.2 Partisipasi perempuan dalam penyediaan air bersih rumah tangga lebih besar 6.3 Kontrol terhadap kualitas baku mutu dan pembangunan limbah masih rendah	<b>7. Kerawanan pangan &amp; energi</b> 7.1 Akses energi listrik perdesaan terbatas, akses edukasi pengankaragaman pangan rendah 7.2 Perempuan berperan memenuhi energi RT di perdesaan, edukasi pemenuhan gizi keluarga rendah 7.3 Alih fungsi lahan produksi pangan, pengawasan stabilitas harga dan distribusi pangan	<b>8. Kerentanan pesisir</b> 8.1 Rendahnya akses edukasi laki-laki dalam menjaga terumbu karang dan mangrove 8.2 Rendahnya partisipasi masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian terumbu karang dan mangrove 8.3 Rendahnya pengawasan dan penindakan pelaku pengrusakan terumbu karang dan mangrove
---	---	---	---	---	--	---	---

## 7 Simpulan dan rekomendasi

- Pentingnya integrasi aspek gender dalam perencanaan, terutama adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Integrasi ini harus dilakukan mulai dari **tahap desain hingga implementasi, dan diterjemahkan menjadi perencanaan strategis dan panduan operasional yang responsif gender.**
- Dibutuhkan **penyusunan indikator dan data terpilah gender** untuk membantu telaah isu yang tepat sasaran dan penyusunan kebijakan yang responsif gender. Indikator-indikator ini perlu mempertimbangkan faktor-faktor sosial seperti proses pengambilan keputusan, penetapan agenda, keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga, akses mereka terhadap aset dan pasar, dan pengembangan kapasitas.
- Peningkatan **kapasitas kelembagaan para pemangku kepentingan di semua tingkatan** diperlukan untuk mensinergikan rencana dan aksi serta menggabungkan sumber pendanaan yang berbeda. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan mekanisme pendanaan dalam jangka panjang serta alokasi bagi masyarakat marginal.
- **Penganggaran responsif gender** harus memasukkan variabel-variabel gender dalam pemantauan di semua tingkatan.

Bentang lahan berkelanjutan untuk penghidupan berketahanan iklim di Indonesia

#LahanUntukKehidupan  
[www.lahanuntukkehidupan.id](http://www.lahanuntukkehidupan.id)